

Pengaruh Sistem Akuntansi Akrua, Pengawasan Keuangan Daerah, Dan Transparansi, Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi

The Influence Of Accrual Accounting Systems, Regional Financial Oversight, And Transparency On The Quality Of Regional Financial Reporting With Information Technology Utilization As A Moderating Variable

Tegar Wahyu Pratama^{a*}, Triyono^b

Universitas Muhammadiyah Surakarta^{a,b}

^ab200220034@student.ums.ac.id*, ^btri280@ums.ac.id

Abstract

This study aims to examine the influence of the Accrual Accounting System, Regional Financial Oversight, and Transparency on the Quality of Regional Financial Reporting, with Information Technology Utilization as a moderating variable, in Regional Government Organizations (Organisasi Perangkat Daerah/OPD) of Brebes Regency. The study employed a quantitative approach with hypothesis testing. Primary data were collected through questionnaires distributed to 120 respondents selected using a purposive sampling technique from 30 OPDs, consisting of heads of OPDs, heads of finance divisions, treasurers, and accountancy. All variables were measured using a five-point Likert scale and analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results indicate that the Accrual Accounting System and Regional Financial Oversight have a positive and significant effect on the Quality of Regional Financial Reporting, whereas Transparency has no significant effect. Furthermore, Information Technology Utilization does not moderate the relationships between the Accrual Accounting System, Regional Financial Oversight, and Transparency and the Quality of Regional Financial Reporting.

Keywords: Accrual Accounting System; Information Technology Utilization; Quality of Regional Financial Reporting; Regional Financial Oversight; Transparency.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Akrua, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Transparansi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai variabel moderasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Brebes. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 120 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dari 30 OPD, yang terdiri atas kepala OPD, kepala bagian keuangan, bendahara, dan akuntansi. Seluruh variabel diukur menggunakan skala Likert lima poin dan dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Akrua dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah, sedangkan Transparansi tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak mampu memoderasi hubungan antara Sistem Akuntansi Akrua, Pengawasan Keuangan Daerah, maupun Transparansi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Kata Kunci: Akuntansi Akrua; Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah; Pengawasan Keuangan Daerah; Pemanfaatan Teknologi Informasi; Transparansi.

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan pemerintah yang berkualitas harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelaporan keuangan merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan *good governance*. Pelaporan keuangan daerah yang berkualitas akan mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Menurut Mardiasmo (2002), pemerintah daerah memiliki dua bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintah pusat dan pertanggungjawaban horizontal kepada DPRD serta masyarakat. Kedua bentuk pertanggungjawaban tersebut merupakan elemen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kualitas penyusunan laporan keuangan sektor publik menjadi indikator penting dalam menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penerapan SAP berbasis akrual diharapkan mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan karena seluruh hak, kewajiban, pendapatan, dan beban dicatat sesuai periode terjadinya, tidak hanya ketika terjadi arus kas. Menurut Defitri (2014), laporan keuangan pemerintah daerah harus mampu menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, pelaksanaan anggaran, serta informasi lain yang relevan melalui Catatan atas Laporan Keuangan.

Namun demikian, penerapan akuntansi berbasis akrual tidak secara otomatis menjamin peningkatan kualitas laporan keuangan. Menurut Sumardi (2008, sebagaimana dikutip dalam Ternalemta et al., 2021), organisasi yang baru menerapkan akuntansi berbasis akrual umumnya memerlukan waktu untuk memahami dan mengimplementasikan sistem tersebut secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SAP masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman akuntansi, serta lemahnya sistem pengawasan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pengawasan keuangan yang efektif diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Pengawasan keuangan, baik internal maupun eksternal, memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi serta mencegah terjadinya *fraud*. Pengawasan yang lemah berpotensi menimbulkan pelaporan keuangan yang manipulatif sehingga informasi yang disajikan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Menurut Yosa (2010, sebagaimana dikutip dalam Rahayu & Dewi, 2022), pengawasan merupakan upaya sistematis untuk menetapkan standar kinerja, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, mengidentifikasi penyimpangan, serta melakukan tindakan perbaikan agar sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi.

Selain pengawasan, transparansi keuangan daerah juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah berkewajiban menyediakan informasi keuangan dan informasi lainnya secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Transparansi menjadi salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik karena mencerminkan adanya keterbukaan, partisipasi masyarakat, serta kemudahan akses terhadap informasi publik. Menurut Mardiasmo (2006, sebagaimana dikutip dalam Rahayu & Dewi, 2022), transparansi merupakan

keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Di era digital, hubungan antara pengawasan, transparansi, dan kualitas pelaporan keuangan tidak dapat dipisahkan dari pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi meliputi *computer* (*mainframe*, *mini*, dan *micro*), *software*, *database*, jaringan *internet* dan *intranet*, *electronic commerce*, serta berbagai teknologi pendukung lainnya (Roshanti et al., 2014). Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian informasi keuangan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, jaringan *internet* yang kurang stabil, kapasitas *server* yang terbatas, perangkat keras yang sudah usang, tingginya risiko keamanan data, serta masih adanya proses administrasi yang dilakukan secara manual.

Fenomena tersebut juga ditemukan pada Pemerintah Kabupaten Brebes. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset daerah, antara lain perbedaan data antara Kartu Inventaris Barang (KIB) dan neraca yang belum dapat dijustifikasi, penatausahaan aset tetap yang belum dilakukan secara optimal, aset yang belum terdaftar atau belum diketahui nilainya, serta aset tanah yang belum memiliki sertifikat. Temuan tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan sistem pengendalian internal. Akibatnya, kualitas laporan keuangan menjadi kurang andal karena masih terdapat kesalahan pencatatan, ketidakpatuhan terhadap peraturan, serta rendahnya efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam kondisi tersebut, pemanfaatan teknologi informasi menjadi semakin penting untuk mendukung proses pencatatan, penyimpanan, dan penyajian informasi keuangan secara akurat, tepat waktu, dan aman (Atiningsih, 2020).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengawasan keuangan daerah, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, kualitas sumber daya manusia, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Namun demikian, hasil penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut masih menunjukkan temuan yang beragam sehingga diperlukan pengujian kembali pada konteks pemerintah daerah yang berbeda. Selain itu, penelitian yang menguji secara simultan pengaruh pengawasan keuangan daerah, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, transparansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Brebes masih relatif terbatas. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengujian keempat faktor tersebut secara simultan pada OPD Kabupaten Brebes sebagai upaya memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang paling dominan memengaruhi kualitas pelaporan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengawasan keuangan daerah, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, transparansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Brebes. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan literatur di bidang akuntansi sektor publik serta menjadi bahan

evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Brebes dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan daerah.

2. Tinjauan Literatur

Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan Stewardship Theory, Compliance Theory, dan Technology Acceptance Model (TAM) sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan daerah. Stewardship Theory yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991) menjelaskan bahwa seorang *steward* akan mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Dalam konteks pemerintahan daerah, aparatur pemerintah bertindak sebagai *steward* yang bertanggung jawab mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga teori ini menjadi dasar dalam menjelaskan bahwa kualitas pelaporan keuangan dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah melaksanakan fungsi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara optimal.

Selanjutnya, Compliance Theory digunakan untuk menjelaskan pentingnya penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Teori ini menyatakan bahwa individu maupun organisasi cenderung mematuhi peraturan, standar, dan ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan bentuk kepatuhan pemerintah daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Basis akrual mengakui dan mencatat transaksi ekonomi pada saat transaksi terjadi tanpa bergantung pada waktu penerimaan maupun pengeluaran kas (Rosana & Bharata, 2023). Semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi, semakin baik kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan. Selain itu, teori kepatuhan juga mendukung pentingnya pengawasan keuangan daerah dan transparansi sebagai mekanisme untuk memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan.

Penelitian ini juga menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989, sebagaimana dikutip dalam Aditya & Wardhana, 2016) untuk menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan. TAM menyatakan bahwa seseorang akan menerima dan menggunakan suatu teknologi apabila teknologi tersebut dipersepsikan bermanfaat (*perceived usefulness*) dan mudah digunakan (*perceived ease of use*). Dalam konteks pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan keakuratan proses pencatatan, pengolahan, serta penyajian informasi keuangan. Oleh karena itu, semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi, semakin baik kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh sistem akuntansi akrual terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.

Sesuai dengan norma pemerintah (SAP), akuntansi yang berlandaskan akrual menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan, tepat, menyeluruh, dan relevan. Menyediakan data keuangan yang lebih tepat dan menyeluruh agar dapat

meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Dengan adanya standar akuntansi berbasis akrual untuk pemerintah, kualitas penyajian laporan keuangan dapat meningkat.

Menurut Penelitian Wijayanti (2017) penerapan standar akuntansi akrual memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan yang ada. SAP, yang merupakan pedoman, menjamin bahwa laporan keuangan disusun untuk memenuhi kriteria informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya. Menurut Rosana & Bharata (2023) Akuntansi berbasis akrual (*accrual basic*) juga memiliki kelebihan yang harus diketahui seperti lebih akurat dalam penggambaran keadaan keuangan suatu instansi serta mampu menjadi pertimbangan dan penilaian pada kinerja instansi atau perusahaan yang dimaksudkan. Informasi yang bermanfaat menjadi indikator bahwa laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dibuat oleh entitas pemerintah akan memiliki kualitas yang baik. Dengan demikian, peneliti berpendapat ada hubungan yang positif antara penerapan akuntansi berbasis akrual dan mutu pelaporan keuangan daerah.

Penelitian Wijayanti (2017) menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi akrual berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Hasil serupa juga ditemukan oleh (Rosana & Bharata, 2023). Berdasarkan Compliance Theory, penerapan sistem akuntansi akrual merupakan bentuk kepatuhan pemerintah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah. Namun, penelitian Dani (2023) menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi akrual belum tentu mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan apabila belum didukung oleh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem yang optimal

H₁: Sistem akuntansi akrual berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.

Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.

Pelaporan keuangan daerah yang akurat dan terpercaya adalah salah satu indikator utama dari pemerintah yang baik serta transparan. Oleh sebab itu, pengawasan keuangan daerah sangat krusial untuk memastikan keandalan laporan keuangan daerah. Pengawasan keuangan daerah dijalankan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pengawasan keuangan daerah, BPKP menyediakan arahan supervise, dan audit pada pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh besar terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan *Stewardship Theory*, pengawasan merupakan bentuk pengendalian yang mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Menurut Yosa (2010, dalam Rahayu & Dewi, 2022) Pengawasan merupakan suatu usaha yang terstruktur untuk menentukan standar kinerja dalam perencanaan, dengan tujuan merancang sebuah sistem umpan balik informasi. Proses ini bertujuan untuk membandingkan kinerja yang nyata dengan kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, hal ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan dan pengambilan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk

memastikan bahwa sumber daya organisasi atau pemerintahan digunakan seoptimal dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan tersebut. Menurut Muhammad Azlan (2015) Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan pengawasan keuangan daerah, upaya evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan daerah dari pencatatan transaksi, uji validitas bukti transaksi, pendokumentasian bukti transaksi yang nantinya akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan, akan dilakukan. Menurut De Vollys Pera (2024) Adanya pengawasan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah karena pengawasan yang kuat dapat mengelola keuangan menjadi lebih baik, lebih efisien dan mengurangi risiko pemborosan, penyalahgunaan anggaran atau korupsi serta dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Namun, Dani (2023) menemukan bahwa efektivitas pengawasan belum tentu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan apabila belum didukung oleh pemanfaatan sistem dan sumber daya yang memadai.

H₂: Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap pelaporan keuangan daerah.

Pengaruh transparansi terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Berdasarkan *Stewardship Theory*, transparansi menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik.

Menurut penelitian Rahayu & Dewi (2022) Transparansi merupakan data finansial yang dapat diakses dan disampaikan dengan jujur kepada publik dengan alasannya adalah bahwa Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya yang diberikan, laporan keuangan dilihat dari data yang mendukung informasi finansial tersebut. Berdasarkan hasil pengujian dari Rahayu & Dewi (2022) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh pemerintah melalui beberapa aspek salah satunya adalah laporan keuangan mudah diakses melalui media website milik pemerintah.

Namun, menurut Alpi & Akmalia (2025) Meskipun secara kebijakan transparansi menjadi prioritas, dalam praktiknya terdapat hambatan seperti keterbatasan saluran komunikasi informasi laporan keuangan kepada publik dan masyarakat yang kurang aktif memanfaatkan informasi tersebut. Menurut De Vollys Pera (2024) Terdapat beberapa hal dalam pengelolaan keuangan yang tidak transparan atau dapat diakses oleh masyarakat, yaitu rincian anggaran pelaksanaan program dan kegiatan keuangan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah, dan dukungan media informasi yang terbatas secara umum mengenai organisasi perangkat daerah, antara lain struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah yang menyebabkan transparansi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₃: Transparansi berpengaruh terhadap pelaporan keuangan daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi memoderasi pengaruh sistem akuntansi akrual terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.

Penggunaan teknologi informasi seperti sistem informasi akuntansi berbasis cloud dan aplikasi ERP (Enterprise Resource Planning) memperkuat dampak penerapan sistem akuntansi akrual pada mutu laporan keuangan daerah. Teknologi informasi mendukung teknik pengolahan data keuangan secara langsung, meminimalkan kesalahan manual, dan meningkatkan ketepatan pengakuan pendapat serta biaya, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan berarti. Teknologi informasi adalah sebuah sarana yang dipakai untuk mempercepat proses pemrosesan yang dipakai untuk mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan (Dwirandra3, 2016).

Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan bahwa teknologi informasi akan memberikan manfaat apabila pengguna merasakan kemudahan penggunaan dan manfaat dari teknologi tersebut. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mendukung penerapan sistem akuntansi akrual sehingga proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan menjadi lebih efektif.

Menurut penelitian Atiningsih (2020) dengan memanfaatkan teknologi informasi, hasil laporan keuangan lebih akurat dibanding menggunakan manual sehingga laporan keuangan yang disajikan menjadi lebih tepat waktu dan andal. menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu meningkatkan efektivitas penerapan sistem akuntansi pemerintah sehingga kualitas laporan keuangan menjadi lebih baik. Sebuah penelitian serupa juga dilakukan oleh Sari et al., (2016) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu memperkuat implementasi akuntansi berbasis akrual. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat membantu proses pencatatan, pengolahan, dan penyajian data keuangan secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Namun, menurut Inge et al., (2025) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mampu memperkuat hubungan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa keberadaan teknologi informasi saja belum cukup untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem akuntansi apabila tidak didukung oleh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, serta pemanfaatan teknologi yang optimal.

H4: Pemanfaatan teknologi informasi memoderasi pengaruh sistem akuntansi akrual terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi memoderasi pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu mendukung proses pengawasan melalui penyediaan informasi yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses. Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM), penggunaan teknologi yang diterima oleh pengguna akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, termasuk dalam kegiatan pengawasan keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi, penyajian laporan keuangan, serta pengawasan keuangan sehingga laporan keuangan tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatwaktuan (Makarina, 2024).

Menurut, Rahayu & Dewi (2022) Melalui proses pengawasan ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan itu, pengawasan keuangan yang baik akan memberikan keyakinan mengenai kualitas laporan keuangan. Menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.

Namun pada penelitian Dani (2023) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mampu memperkuat hubungan antara pengawasan keuangan daerah dengan kualitas pelaporan keuangan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi belum tentu meningkatkan efektivitas pengawasan apabila belum dimanfaatkan secara optimal atau belum didukung oleh kompetensi aparatur dan kesiapan infrastruktur teknologi. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya research gap mengenai peran teknologi informasi sebagai variabel moderasi.

H5: Pemanfaatan teknologi informasi memoderasi pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi memoderasi pengaruh transparansi terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.

Penggunaan teknologi informasi, seperti portal e-government dan platform data terbuka, meningkatkan dampak transparansi terhadap mutu laporan keuangan daerah. Dengan merilis data keuangan secara transparan dan bisa diakses oleh Masyarakat, teknologi informasi mendorong akuntabilitas, keterlibatan public dalam pengawasan, serta peningkatan kepercayaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Teknologi computer dan teknologi komunikasi digabungkan menjadi teknologi informasi. Teknologi informasi mempunyai keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi datanya. Pemanfaatan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan membawa berbagai manfaat dalam hal keakuratan dan ketepatan hasil, serta mengurangi kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja (Erawati & Abdulhadi, 2018, dalam Hanifah, 2023).

Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan pemerintah menyampaikan informasi keuangan secara lebih cepat, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat. Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM), teknologi yang dimanfaatkan secara optimal diharapkan mampu mendukung penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut, Rahayu & Dewi (2022) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi juga berperan dalam meningkatkan transparansi melalui penyediaan informasi keuangan yang lebih cepat, mudah diakses, dan akurat sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

Namun, Alpi & Akmalia (2025) menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Selain itu, menurut Inge et al., (2025) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi tidak mampu memperkuat hubungan antara variabel independen dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan teknologi informasi belum tentu mampu meningkatkan pengaruh transparansi apabila belum dimanfaatkan secara optimal dan belum didukung oleh komitmen organisasi dalam menerapkan keterbukaan informasi. H6: Pemanfaatan teknologi informasi memoderasi pengaruh transparansi terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden pada 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Brebes, dengan teknik *purposive sampling* yang menghasilkan 120 responden yang terdiri atas kepala OPD, kepala bagian keuangan, bendahara, dan akuntan. Penelitian ini menguji pengaruh Sistem Akuntansi Akrua, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Transparansi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai variabel moderasi. Seluruh variabel diukur menggunakan indikator yang diadaptasi dari literatur dan peraturan terkait serta dinilai menggunakan skala Likert lima poin. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* dengan bantuan SmartPLS 4.0 melalui evaluasi *outer model*, *inner model*, dan pengujian hipotesis untuk menguji hubungan antarvariabel dalam model penelitian (Sugiyono, 2023; Pramuwari et al., 2024).

4. Hasil Dan Pembahasan

Deskripsi Data

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, penelitian ini melibatkan responden yang berasal dari 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Brebes. Karakteristik responden berdasarkan usia, pendidikan terakhir, dan masa kerja disajikan pada Tabel 1:

Tabel 1. Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah Responden	Presentasi
Usia/Umur:		
<25 Tahun	4	3%
25-35 Tahun	46	38%
>35-45 Tahun	41	34%
>45 Tahun	29	24%
Pendidikan Terakhir:		
Sarjana (S2)	12	10%
Sarjana (S1)	80	67%
Diploma	20	17%
SMA/SMK	8	7%
Masa Kerja:		
<10 Tahun	47	39%
>10-20 Tahun	43	36%
>20 Tahun	30	25%

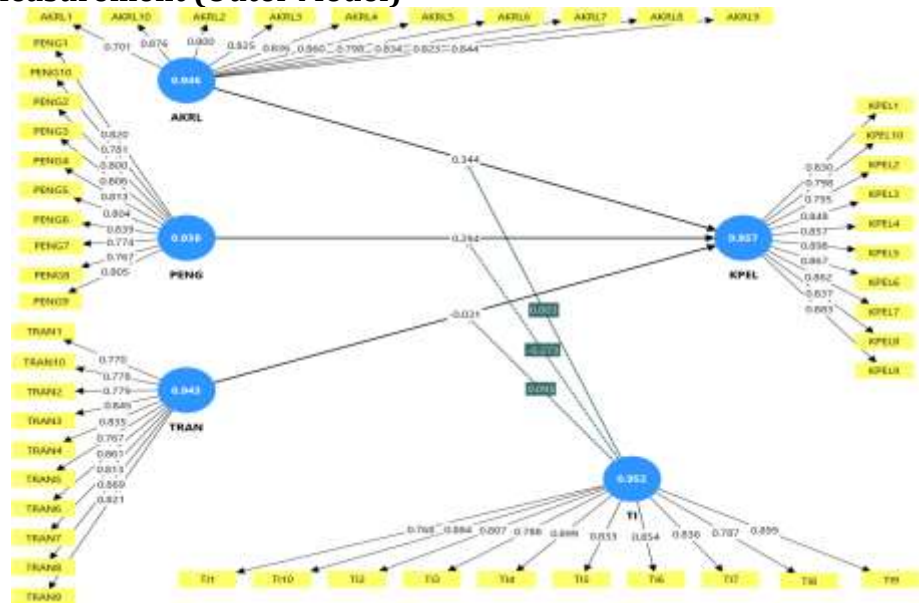
Sumber: Data Primer diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 1, penelitian ini melibatkan 120 responden yang terdiri atas Kepala OPD, Kepala Bagian Keuangan, Bendahara, dan Akuntan dari 30 OPD di Kabupaten Brebes. Mayoritas responden berusia 25–35 tahun sebanyak 46 orang (38%), diikuti kelompok usia 35–45 tahun sebanyak 41 orang (34%), usia di atas 45 tahun sebanyak 29 orang (24%), dan usia di bawah 25 tahun sebanyak 4 orang (3%). Dari sisi pendidikan, sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir Sarjana (S1) sebanyak 80 orang (67%), diikuti Diploma sebanyak 20 orang (17%), Magister (S2) sebanyak 12 orang (10%), dan SMA/SMK sebanyak 8 orang (7%). Berdasarkan masa kerja, mayoritas responden telah bekerja kurang dari 10 tahun sebanyak 47 orang (39%), disusul masa kerja 10–20 tahun sebanyak 43 orang (36%) dan lebih dari 20 tahun sebanyak 30 orang (25%). Komposisi karakteristik tersebut menunjukkan

bahwa responden didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan sarjana dan pengalaman kerja yang cukup memadai sehingga dinilai mampu memberikan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil Penelitian

Model Measurement (Outer Model)



Gambar 1. Outer Loading

Uji *outer loading* dilakukan untuk mengevaluasi validitas konvergen (*convergent validity*) setiap indikator dalam mengukur konstruk penelitian. Hasil pengujian *outer loading* pada masing-masing indikator disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Outer Loading

Indikator	Outer Loading	Keterangan
KPEL1	0,830	Valid
KPEL10	0,798	Valid
KPEL2	0,795	Valid
KPEL3	0,848	Valid
KPEL4	0,857	Valid
KPEL5	0,898	Valid
KPEL6	0,867	Valid
KPEL7	0,862	Valid
KPEL8	0,837	Valid
KPEL9	0,883	Valid
AKRL1	0,701	Valid
AKRL10	0,876	Valid
AKRL2	0,800	Valid
AKRL3	0,825	Valid
AKRL4	0,836	Valid
AKRL5	0,860	Valid
AKRL6	0,798	Valid
AKRL7	0,834	Valid
AKRL8	0,823	Valid
AKRL9	0,844	Valid
PENG1	0,820	Valid
PENG10	0,781	Valid

PENG2	0,800	Valid
PENG3	0,806	Valid
PENG4	0,813	Valid
PENG5	0,804	Valid
PENG6	0,839	Valid
PENG7	0,774	Valid
PENG8	0,767	Valid
PENG9	0,805	Valid
TRAN1	0,770	Valid
TRAN10	0,778	Valid
TRAN2	0,779	Valid
TRAN3	0,845	Valid
TRAN4	0,835	Valid
TRAN5	0,767	Valid
TRAN6	0,861	Valid
TRAN7	0,813	Valid
TRAN8	0,869	Valid
TRAN9	0,821	Valid
TI1	0,768	Valid
TI10	0,884	Valid
TI2	0,807	Valid
TI3	0,788	Valid
TI4	0,899	Valid
TI5	0,833	Valid
TI6	0,854	Valid
TI7	0,836	Valid
TI8	0,787	Valid
TI9	0,899	Valid

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2026

Berdasarkan Tabel 2, seluruh indikator pada variabel Sistem Akuntansi Akrua (AKRL), Pengawasan Keuangan Daerah (PENG), Transparansi (TRAN), Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), dan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (KPEL) memiliki nilai *outer loading* di atas 0,70, dengan rentang nilai antara 0,701 hingga 0,899. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi kriteria validitas konvergen (*convergent validity*), sehingga setiap indikator mampu merefleksikan konstruk yang diukur secara memadai. Dengan demikian, tidak terdapat indikator yang perlu dieliminasi, dan seluruh indikator dinyatakan valid serta layak digunakan dalam tahap pengujian model selanjutnya.

Validitas Diskriminan

Setelah seluruh indikator dinyatakan memenuhi validitas konvergen, tahap selanjutnya adalah menguji validitas diskriminan menggunakan kriteria *Fornell-Larcker*. Hasil pengujian tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. *Fornell-Larcker criterion*

	AKRL	KPEL	PENG	TI	TRAN
AKRL	0,821				
KPEL	0,723	0,848			
PENG	0,722	0,745	0,801		
TI	0,334	0,520	0,576	0,837	
TRAN	0,720	0,645	0,752	0,517	0,815

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2026

Berdasarkan Tabel 3, hasil uji validitas diskriminan menggunakan kriteria *Fornell-Larcker* menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat *Average Variance Extracted* (AVE) pada setiap konstruk (nilai diagonal) lebih besar dibandingkan nilai korelasi antar konstruk lainnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap konstruk memiliki kemampuan yang baik dalam membedakan dirinya dari konstruk lain sehingga validitas diskriminan telah terpenuhi. Dengan demikian, masing-masing variabel dalam penelitian ini terbukti mengukur konsep yang berbeda sesuai dengan konstruk yang dimaksud, sehingga model pengukuran (*measurement model*) dinyatakan memenuhi kriteria validitas diskriminan berdasarkan metode *Fornell-Larcker*.

Uji Reliabilitas

Setelah seluruh indikator dinyatakan valid, tahap berikutnya adalah menguji reliabilitas konstruk untuk memastikan konsistensi internal setiap variabel penelitian. Hasil pengujian *construct reliability* disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. *Construct reliability and validity*

Indikator	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_c)	Keterangan
AKRL	0,946	0,954	Reliabel
KPEL	0,957	0,962	Reliabel
PENG	0,938	0,947	Reliabel
TI	0,952	0,959	Reliabel
TRAN	0,943	0,952	Reliabel

Sumber: Hasil olah data penelitian, 2026.

Berdasarkan Tabel 4, seluruh konstruk penelitian memiliki nilai *Cronbach's alpha* dan *composite reliability (rho_c)* di atas batas minimum 0,70, sehingga seluruh variabel memenuhi kriteria reliabilitas. Variabel AKRL memiliki nilai *Cronbach's alpha* sebesar 0,946 dan *composite reliability* sebesar 0,954, KPEL sebesar 0,957 dan 0,962, PENG sebesar 0,938 dan 0,947, TI sebesar 0,952 dan 0,959, serta TRAN sebesar 0,943 dan 0,952. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik, sehingga instrumen penelitian dinilai reliabel dan layak digunakan untuk analisis pada tahap selanjutnya.

Pengujian Model Struktural (Inner Model)

Uji Koefisien Determinasi

Pengujian *coefficient of determination (R-Square adjusted)* dilakukan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil pengujian *R-Square adjusted* disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. *R-Square adjusted*

Indikator	R-square	R-square adjusted	Keterangan
KPEL	0,732	0,715	Kuat

Sumber: Hasil olah data penelitian, 2026.

Berdasarkan Tabel 5, nilai *R-Square adjusted* pada variabel kualitas pelaporan keuangan sebesar 0,715. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi akrual, pengawasan keuangan daerah, transparansi, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi mampu menjelaskan sebesar 71,5% variasi kualitas pelaporan keuangan, sehingga model penelitian termasuk dalam

kategori kuat. Adapun sisanya sebesar 28,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Uji Effect Size

Uji *f-square* dilakukan untuk mengetahui besarnya efek masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam model penelitian. Hasil pengujian *f-square* disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Uji F-Square

Indikator	f-square	Keterangan
AKRL -> KPEL	0,147	Sedang
PENG -> KPEL	0,097	Lemah
TRAN -> KPEL	0,001	Lemah
TI x AKRL -> KPEL	0,000	Lemah
TI x PENG -> KPEL	0,120	Lemah
TI x TRAN -> KPEL	0,015	Lemah

Sumber: Hasil olah data penelitian, 2026.

Berdasarkan Tabel 6, variabel Akuntansi Akrua (AKRL) memiliki ukuran efek (*effect size*) sedang terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (KPEL) dengan nilai *f-square* sebesar 0,147. Sementara itu, Pengawasan Keuangan Daerah (PENG), Transparansi (TRAN), serta interaksi Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dengan Akuntansi Akrua, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Transparansi menunjukkan ukuran efek yang lemah karena memiliki nilai *f-square* di bawah 0,15. Hasil ini mengindikasikan bahwa Akuntansi Akrua memberikan kontribusi yang relatif lebih besar dalam meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan dibandingkan variabel independen maupun variabel moderasi lainnya dalam model penelitian.

Uji Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen serta menguji peran variabel moderasi dalam model penelitian. Adapun hasil pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil uji Hipotesis

Indikator	Original sample (O)	T statistics (O/STDEV)	P values
AKRL -> KPEL	0,344	2,968	0,003
PENG -> KPEL	0,294	2,788	0,005
TRAN -> KPEL	-0,031	0,283	0,777
TI x AKRL -> KPEL	0,003	0,019	0,985
TI x PENG -> KPEL	-0,273	1,914	0,056
TI x TRAN -> KPEL	0,095	0,656	0,512

Sumber: Hasil Olah data penelitian, 2026.

Berdasarkan Tabel 7, hasil pengujian menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Akrua berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah dengan nilai *original sample* sebesar 0,344, *t-statistics* sebesar 2,968 ($>1,96$), dan *p-value* sebesar 0,003 ($<0,05$). Pengawasan Keuangan Daerah juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah dengan nilai *original sample* sebesar 0,294, *t-statistics* sebesar 2,788 ($>1,96$), dan *p-value* sebesar 0,005 ($<0,05$). Sebaliknya, Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah karena memiliki nilai *original sample* sebesar -0,031, *t-statistics* sebesar 0,283 ($<1,96$), dan *p-value* sebesar 0,777 ($>0,05$). Selain itu, Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai variabel moderasi tidak mampu

memoderasi hubungan antara Sistem Akuntansi Akrua, Pengawasan Keuangan Daerah, maupun Transparansi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *t-statistics* interaksi TI × Sistem Akuntansi Akrua sebesar 0,019 dengan *p-value* 0,985, TI × Pengawasan Keuangan Daerah sebesar 1,914 dengan *p-value* 0,056, serta TI × Transparansi sebesar 0,656 dengan *p-value* 0,512, yang seluruhnya tidak memenuhi kriteria signifikansi (*t-statistics* < 1,96 dan *p-value* > 0,05).

Pembahasan

Pengaruh Akuntansi Akrua Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntansi Akrua memiliki nilai *t-statistics* sebesar 2,968 dan *p-value* sebesar 0,003. Karena nilai *t-statistics* lebih besar dari 1,96 dan *p-value* lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Akrua berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi akrua berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Stewardship Theory* yang dikemukakan oleh (Donaldson & Davis, 1991). Teori ini menjelaskan bahwa aparatur pemerintah sebagai *steward* memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik secara optimal demi kepentingan masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah menerapkan sistem akuntansi akrua secara konsisten agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih lengkap, andal, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, hasil penelitian ini juga didukung oleh *Compliance Theory* yang menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi dasar penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Semakin baik penerapan sistem akuntansi akrua sesuai dengan standar yang berlaku, maka semakin baik pula kualitas pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Wijayanti (2017) dan Rosana & Bharata (2023) yang menyatakan bahwa implementasi akuntansi akrua berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah memiliki nilai *t-statistics* sebesar 2,788 dan *p-value* sebesar 0,005. Karena nilai *t-statistics* lebih besar dari 1,96 dan *p-value* lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah diterima.

Temuan ini sejalan dengan *Stewardship Theory* yang menyatakan bahwa aparatur pemerintah sebagai *steward* memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, pengawasan keuangan daerah berperan sebagai mekanisme untuk memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semakin baik sistem pengawasan yang diterapkan, maka semakin efektif proses penyusunan laporan keuangan sehingga kualitas laporan yang dihasilkan juga akan meningkat.

Menurut Muhammad Azlan (2015) pengawasan keuangan daerah merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mampu mencegah terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, keberadaan sistem pengawasan yang baik akan mendorong terciptanya laporan keuangan yang berkualitas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahayu & Dewi (2022), Muhammad Azlan (2015), & Ari Susanti (2024) yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi memiliki nilai t-statistics sebesar 0,283 dan p-value sebesar 0,777. Karena nilai t-statistics lebih kecil dari 1,96 dan p-value lebih besar dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah ditolak.

Temuan ini sejalan dengan Stewardship Theory, yang menjelaskan bahwa pemerintah sebagai *steward* berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi belum mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan secara langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi kepada masyarakat belum cukup apabila belum didukung oleh penerapan sistem akuntansi yang baik, pengawasan yang efektif, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan De Vollys Pera (2024) dan Alpi & Akmalia (2025) yang menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintahan.

Pengaruh Akuntansi Akrual Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan diperoleh nilai t-statistics sebesar 0,019, dan p-value sebesar 0,985. Nilai t-statistics lebih kecil dari 1,96 dan nilai p-value lebih besar dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak mampu memoderasi pengaruh Sistem Akuntansi Akrual terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) ditolak.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh (Davis, 1989). Teori TAM menjelaskan bahwa penerimaan dan penggunaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi mengenai kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi mengenai manfaat (*perceived usefulness*). Dalam penelitian ini, hasil yang tidak signifikan menunjukkan bahwa teknologi informasi yang digunakan belum sepenuhnya memberikan manfaat tambahan dalam mendukung penerapan sistem akuntansi akrual. Hal tersebut dapat terjadi karena aparatur lebih mengandalkan pemahaman terhadap prosedur akuntansi dibandingkan dengan fitur-fitur teknologi yang tersedia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Inge et al. (2025) & Dani, (2023) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mampu memperkuat

hubungan antara penerapan sistem akuntansi dengan kualitas pelaporan keuangan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan sistem akuntansi lebih dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia dan kepatuhan terhadap standar akuntansi dibandingkan dengan penggunaan teknologi informasi.

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan diperoleh nilai t-statistics sebesar 1,914, dan p-value sebesar 0,056. Nilai t-statistics lebih kecil dari 1,96 dan nilai p-value lebih besar dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak mampu memoderasi pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah. Dengan demikian, hipotesis kelima (H5) ditolak.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil Tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya organisasi atau pemerintah telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan Yosa (2010) dalam (Dani, 2023).

Temuan ini bisa dijelaskan menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh (Davis, 1989). Menurut teori ini, teknologi informasi akan memberikan manfaat apabila pengguna benar-benar menerima dan memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal. Dalam penelitian ini, hasil yang tidak signifikan menunjukkan bahwa teknologi informasi yang digunakan oleh OPD Kabupaten Brebes belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kegiatan pengawasan. Penggunaan teknologi masih lebih banyak berfungsi sebagai sarana administrasi dan penyimpanan data dibandingkan sebagai alat untuk memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dani (2023) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Selain itu, penelitian Inge et al. (2025) juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi justru memperlemah hubungan antara variabel independen dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Namun demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rahayu & Dewi (2022) pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Perbedaan hasil tersebut diduga disebabkan oleh adanya perbedaan tingkat kesiapan infrastruktur teknologi, kemampuan pengguna sistem, serta karakteristik organisasi pada masing-masing objek penelitian.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan diperoleh nilai t-statistics sebesar 0,656, dan p-value sebesar 0,512. Nilai t-statistics lebih kecil dari 1,96 dan nilai p-value lebih besar dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa Pemanfaatan

Teknologi Informasi tidak mampu memoderasi pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah. Dengan demikian, hipotesis keenam (H6) ditolak.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989) teori ini menjelaskan bahwa teknologi informasi akan memberikan manfaat apabila pengguna merasa teknologi tersebut mudah digunakan dan membantu mempermudah pekerjaannya. Dalam penelitian ini, teknologi informasi memang telah digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah, namun penggunaannya lebih banyak dimanfaatkan sebagai media penyimpanan data, penginputan transaksi, dan penyajian informasi. Pemanfaatan tersebut belum diarahkan secara optimal untuk meningkatkan transparansi yang berdampak langsung pada kualitas pelaporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Inge et al. (2025) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi tidak mampu memperkuat hubungan antara variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Alpi & Akmalia (2025) dan De Vollys Pera (2024) yang menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, penggunaan teknologi informasi belum tentu mampu meningkatkan pengaruh transparansi apabila keterbukaan informasi belum diterapkan secara optimal.

5. Simpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Akrua, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Transparansi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai variabel moderasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Brebes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Akrua dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah, sedangkan Transparansi tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak mampu memoderasi hubungan antara Sistem Akuntansi Akrua, Pengawasan Keuangan Daerah, maupun Transparansi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah. Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes disarankan untuk terus mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntansi Akrua, memperkuat Pengawasan Keuangan Daerah, meningkatkan transparansi, serta mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain, seperti kompetensi sumber daya manusia, *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*, komitmen organisasi, atau budaya organisasi, serta memperluas cakupan objek penelitian agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Ade, A., & Indah, N. (2023). Determinants Of The Quality Of Financial Reports. *JPB*, 8(3), 1–40.
- Aditya, R., & Wardhana, A. (2016). *Pengaruh Perceived Usefulness Dan Perceived Ease Of Use Terhadap Behavioral Intention Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (Tam) Pada Pengguna Instant Messaging Line Di Indonesia*. 20(1), 24–32.

- Al-Matari, E. M., Al-Bukhrani, M. A., Omer, A. M., Alhebri, A., & Ibrahim, T. K. (2024). The moderating effect of the role of accrual basis application controls on the association between government rules application controls on the quality of financial reporting. *Humanities and Social Sciences Letters*, 12(2), 345–364. <https://doi.org/10.18488/73.v12i2.3729>
- Alpi, M. F., & Akmalia, S. N. (2025). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Di Kecamatan Medan Barat. *MANEGGIO*, 8(September), 114–125.
- Atiningsih, S.-. (2020). the Implementation of Government Accounting Standards, Internal Control Systems and Information Technology Utilization on the Quality of Local Government Financial Statements With Organizational Commitments As Moderation Variables. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 4(02), 216–229. <https://doi.org/10.35310/accruals.v4i02.584>
- Bougie. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis* (Edisi 6).
- Černe, M., Čater, B., Čater, T., Koman, M., & Redek, T. (2023). Management innovation as an enabler of firm performance in the context of Industry 4.0: a longitudinal multi-source, multi-sector analysis. *Innovation: Organization and Management*, 26(4), 559–584. <https://doi.org/10.1080/14479338.2023.2177858>
- Dani, M. (2023). *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Akrua, Kapasitas Sdm, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Penyajian Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Kasus OPD di kabupaten Brebes)*. 8(2), 164. <https://doi.org/https://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/7106>
- De Vollys Pera, C. (2024). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ende. *GLORY Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 5(2), 2747-125X. <https://doi.org/https://doi.org/10.35508/glory.v5i2.13057>
- Defitri, S. Y. (2014). Eksplorasi Kebutuhan Stakeholders Terhadap Informasi Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Media Ekonomi*, 22(1), 53–72. <https://doi.org/10.25105/me.v22i1.2817>
- Dwirandra3, F. H. S. B. S. A. A. N. . (2016). *BERBASIS AKRUAL Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Magister Akuntansi , Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia ABSTRAK PENDAHULUAN Tuntutan terhadap tata kelola keuangan negara agar dijalankan dengan transparan dan akuntabel dikarenakan laporan. 8, 2403–2430.*
- Ernita, B., & Cyrenia Tri, N. (2022). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 19(1), 19–39.*
- Gasperz, J. J. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pusat Statistik Wilayah Maluku). *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan)*, 5(2), 75–83. <https://doi.org/10.21070/jbmp.v5i2.2550>
- Hanifah, S. N. (2023). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi , Teknologi Informasi , dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 1(2), 182–194.*

- Inge, I., Yunita, K., & Karpriana, A. P. (2025). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia , Tingkat Pendidikan dan Profesionalisme Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 4(2), 148–160.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Managerial Behavior, Agency and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 305–360.
- Makarina, C. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *PapselEconomic Journal*, 1(3), 25–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.63185/pej.v1i3.79>
- Mardiasmo. (2002). Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 6(1), 63–82.
- Muhammad Azlan, D. (2015). *Pemanfaatan Teknologi Informasi , Pengendalian Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pada Skpd Pemerintah Kabupaten Lombok Timur*. 3, 188–198.
- Nasution, D. A. D. (2019). Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Nur, A. F. (2021). *Hubungan Kepercayaan, Kemudahan, Risiko Yang Didasarkan, Kepuasan Pelanggan, Minat Belanja Kembali: Pengalaman Belanja Online Sebagai Moderator* [Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta]. <http://repositorybaru.stieykpn.ac.id/id/eprint/683>
- Peraturan Pemerintah, N. 71. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pramuswari, I., Kristiawati, I., Prastyorini, J., & Mudayat. (2024). Pengaruh Kualitas Informasi Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian Dimoderasi Pengalaman Belanja Produk Fashion Tiktoshop. *Jurnal Administrasi Bisnis (JUTRANIS)*, 01(01), 1–10.
- Rahayu, K. N. S., & Dewi, L. G. K. (2022). Pengaruh transparansi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 464–471.
- Rosana, L., & Bharata, R. W. (2023). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. *Jurnalku*, 3(1), 23–34. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i1.366>
- Roshanti, A, Sujana, E, & Sinarwati, E. (2014). Pengaruh Kualitas Sdm, Pemanfaatan Ti, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 02(01), 1–12.
- Sugiyono, P. D. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA, cv.
- Susanti, A. (2024). *Hubungan Antara Kinerja Pengawasan dan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pencegahan Fraud dengan Religiusitas dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Sari, F. H., Suprasto, B., & Dwirandra, A. A. N. B. (2016). Motivasi sebagai pemoderasi pengaruh kompetensi dan teknologi informasi pada penerapan akuntansi berbasis akrual. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(8), 2403–2430.

- Ternalemta, Kalangi, L., & Tinangon, J. J. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 12(2), 264–275.
- Thebora, P., Morasa, J., & Rondonuwu, S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Bpk-Ad Kantor Walikota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 575–593. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17976.2017>
- Wijayanti, R. (2017). Pengaruh kompetensi sdm dan implementasi akuntansi akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Volume 6,Nomor 3,Maret 2017*, 6, 18.